

PERENCANAAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA: PERAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA BANK KONVENSIONAL

Ferninda Dewi Ayu¹
Nurul Aisyah Rachmawati^{2*}

^{1,2}(Program Studi Akuntansi, FEBH, Universitas Trilogi, Jakarta)

¹fernindadway269@gmail.com

^{2*}nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

Abstract

One of the crucial elements in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is the financial and tax management that are carried out transparently and efficiently. This study explores how tax planning relates to earnings management practices in conventional banks across Indonesia, highlighting the important role that independent commissioners play as a moderating factor. A quantitative approach is used, with logistic regression, to explore how tax planning influences the likelihood of earnings management and to assess the contribution of independent commissioners in moderating this relationship. The financial statements of conventional banks listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024 were used to gather data, and the samples were chosen carefully through purposive sampling. Data analysis was conducted utilizing STATA software. The findings suggest that tax planning doesn't have a big impact on earnings management, and the presence of independent commissioners doesn't seem to make a significant difference either. This finding implies that highly regulated environments, particularly in the banking sector, may restrict firms' ability to undertake tax planning, making its influence on earnings management less evident.

Keywords: *Earnings Management, Good Corporate Governance, Independent Commissioners, Logistic Regression, Tax Planning*

Abstrak

Salah satu elemen krusial dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor perbankan adalah pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara transparan dan efisien. Studi ini mengeksplorasi apakah perencanaan pajak berkaitan dengan praktik manajemen laba di bank-bank konvensional di Indonesia, sekaligus menyoroti peran penting komisaris independen sebagai faktor moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan, dengan regresi logistik. Laporan keuangan bank-bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024 digunakan untuk data penelitian, dan sampel dipilih dengan cermat melalui *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak STATA. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki dampak besar pada manajemen laba, dan kehadiran komisaris independen tampaknya juga tidak membuat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang *highly regulated*, seperti perbankan, ruang fleksibilitas dalam perencanaan pajak lebih terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap manajemen laba menjadi tidak nyata.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, Regresi Logistik*

I. PENDAHULUAN

Sektor perbankan sangat berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang tepat dan efisien. Perbankan Indonesia memiliki peran utama untuk penghimpunan dan menyalurkan dana dari masyarakat, bertujuan mendukung pelaksanaan dalam pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Namun, industri perbankan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya persaingan, perubahan regulasi, dan risiko keuangan yang meningkat. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia perlu memperbaiki kinerja keuangannya dan lebih memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan langkah ini, bank bisa semakin menarik perhatian investor dan *stakeholder*, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara semua pihak.

Pandemi menyebabkan pengaruh yang besar terhadap sektor perbankan di Indonesia. Pembatasan sosial dan pelemahan aktivitas ekonomi mengakibatkan peningkatan risiko kredit dan penurunan kualitas aset perbankan, dapat terlihat pada naiknya rasio *Non-Performing Loans* (NPL) dan besarnya volume penyesuaian ulang kredit. Profitabilitas bank juga menurun akibat turunnya suku bunga kredit dan peningkatan beban pencadangan. Untuk menjaga stabilitas, pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia memberikan berbagai bentuk dukungan kebijakan dan kelonggaran peraturan, termasuk penempatan dana pemerintah di bank-bank umum serta kebijakan penyesuaian kredit yang sesuai dengan PJOK No.11/PJOK.03/2020 mengenai program pemulihan ekonomi nasional sebagai strategi *countercyclical* untuk mengatasi dampak penyebaran covid-19. Meski menghadapi tekanan, pandemi justru mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan perbankan. Seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional pada 2021-2022, sektor perbankan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan kredit dan peningkatan profitabilitas yang bertahap (OJK, 2020; BI, 2021; BPS, 2022).

Selain pada periode saat pandemi, terdapat fenomena manajemen laba yang dialami oleh perbankan Indonesia terlihat dalam kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 (Wahyuni, 2010). Bank Century mengalami krisis keuangan yang disebabkan oleh manajemen laba yang tidak baik. Bank ini melaporkan laba yang tidak realistis dan melakukan manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan

kerugiannya. Selain fenomena ini, Bank Bukopin juga melakukan perubahan laporan keuangan selama 2015-2017 (Fulian, 2023). Bank Bukopin juga melakukan modifikasi pada kartu kredit dalam jumlah yang signifikan, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Hal ini mengakibatkan peningkatan yang tidak wajar pada posisi kredit dan pendapatan. Sebagai akibatnya, Bank Bukopin harus merevisi laporan keuangannya dari tahun 2015 hingga 2017. Laba bersih tahun 2016 direvisi menjadi Rp 183,6 miliar, turun dari Rp 1,08 triliun sebelumnya. Selain masalah kartu kredit, terdapat juga permasalahan yang muncul sehubungan dengan entitas anak Bank Syariah Bukopin yang dimana mencatat kenaikan saldo cadangan atas kerugian penurunan nilai bagi debitur tertentu.

Pengawasan yang tepat dapat membantu mengurangi manipulasi oleh manajer akibat konflik kepentingan dengan menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Rahmawati, 2013). *Corporate governance* merupakan sebuah kerangka kerja yang mengatur perusahaan melalui pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja, serta menjaga akuntabilitas, dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Konsep tata kelola perusahaan diajukan untuk meningkatkan transparansi bagi semua pengguna data keuangan. Jika dilaksanakan secara efektif, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus bertambah, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi semua pihak (Nasution & Setiawan, 2007).

Menurut Nanda & Somantri (2020), peran komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan manajemen. Komisaris independen tersebut memiliki peran yang sangat krusial di dalam struktur perusahaan. Perannya sangat krusial karena berfungsi sebagai mediator ketika terjadi perselisihan kepentingan dapat muncul antara pemegang saham minoritas dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Komisaris independen merujuk pada individu yang tidak memiliki keterkaitan atau pengaruh dari manajemen, pemegang saham pengendali, atau anggota dewan lainnya (A'alia & Rachmawati, 2022; Simorangkir & Rachmawati, 2020; Amaliyah & Rachmawati, 2019).

Salah satu elemen krusial dalam penerapan GCG pada sektor perbankan adalah pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara transparan dan efisien. Perencanaan pajak bagian dari kebijakan fiskal perusahaan yang diarahkan optimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan. Pelaksanaan harus mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas, dan

kemandirian, untuk menghindari risiko penggelapan keuangan (Aulia & Nuryanto, 2021).

Jika investor merasa kurang yakin terhadap informasi keuangan yang dipengaruhi oleh manajemen laba, mereka cenderung akan menarik dana secara serentak, yang berpotensi menyebabkan terjadinya tekanan pasar atau penurunan nilai saham secara drastis. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai penerapan GCG untuk bank umum menyatakan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan performa bank, menjaga kepentingan para *stakeholders*, serta menjamin kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi dan penerapan etika profesional dalam sektor perbankan, sehingga pelaksanaan GCG menjadi suatu keharusan dalam aktivitas operasional perbankan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan pengembangan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Aulia & Nuryatno (2021) pada industri manufaktur, peneliti menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak positif terhadap manajemen laba, namun penerapan GCG dapat memperlemah dampak tersebut. Sebaliknya, dalam penelitian Ramadhan & Bandiyono (2024) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap manajemen laba. Namun, komisaris independen secara signifikan mampu memoderasi antara perencanaan pajak dan manajemen laba pada industri manufaktur yang terdaftar di IDX. Di sisi lain, penelitian Ariyanti & Rachmawati (2025) yang juga berfokus pada sektor manufaktur menemukan bahwa GCG, termasuk peran komisaris independen, tidak dapat memoderasi antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut belum konsisten.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan memahami pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dan peran komisaris independen sebagai variabel moderasi, terutama di bank konvensional terdaftar di BEI periode 2021-2024. Pemilihan bank konvensional sebagai objek penelitian didasarkan pada data lengkap yang rutin dipublikasikan, serta dominasi bank konvensional di industri perbankan Indonesia dari sisi aset, pangsa pasar, dan entitas di BEI. Selain itu, standar perpajakan dan akuntansi yang seragam memperkecil variabel di luar fokus penelitian, berbeda dengan perbankan syariah yang memiliki perlakuan khusus terkait akad dan pembagian hasil. Sektor perbankan menghadapi tekanan

regulasi dan kebutuhan laporan yang lebih ketat dengan karakteristik bisnis berbeda dibandingkan sektor industri lainnya (Faradita & Rachmawati, 2022; Saraswati & Rachmawati, 2023; Merrysa & Rachmawati, 2018; Rahmawati, 2020; Wulandari & Rachmawati, 2021).

Perbankan konvensional memiliki kekhasan dibandingkan industri lainnya, yaitu sebagai industri yang sangat diatur dengan pengawasan ketat dari OJK dan BI, serta struktur pendapatan yang didominasi oleh bunga pinjaman dan biaya jasa perbankan. Selain itu, sektor ini sangat sensitif terhadap kondisi makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi, sehingga manajemen harus menyesuaikan strategi keuangan dengan cepat. Perbankan konvensional juga berperan sebagai perantara keuangan utama yang mengandalkan kepercayaan publik, sehingga transparansi dan akurasi laporan keuangan menjadi prioritas, didukung oleh penerapan standar akuntansi keuangan yang mengikuti IFRS (OJK, 2024; BI, 2024). Periode penelitian 2021-2024 dipilih karena mencakup data terkini yang sudah menyesuaikan dengan regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku saat ini di Indonesia, serta pada periode ini tersedia secara lengkap dan dapat mudah diakses, sehingga mendukung analisis yang akurat dan dapat dipercaya.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang diusung oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana *principal* memberi mandat dan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*. Dalam hubungan tersebut, *agent* bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan menjadi salah satu kerangka konseptual utama dalam kajian GCG, karena menekankan pentingnya potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Rachmawati et al, 2020).

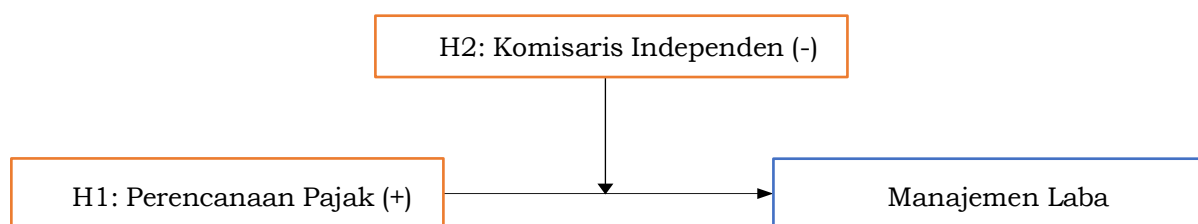
Keterkaitan teori keagenan dengan variabel penelitian ini tampak dari potensi konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari perspektif perusahaan, perencanaan pajak dilakukan sebagai strategi untuk mengelola struktur keuangan secara efisien dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Sementara itu, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan konflik

keagenan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah.

Dalam perspektif teori keagenan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang salah satunya direpresentasikan melalui keberadaan komisaris independen, diharapkan mampu menekan potensi konflik kepentingan (*agency conflict*) antara pemilik dan manajemen. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat membatasi peluang manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang bersifat oportunistik atau berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan demikian, perencanaan pajak yang dilakukan di bawah pengawasan yang memadai diharapkan tidak hanya menguntungkan manajemen, tetapi juga selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak terkait.

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antarvariabel dirumuskan dalam kerangka konseptual yang tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Konseptual
Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti (2025)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merujuk pada kemampuan perusahaan dalam merencanakan aktivitas keuangan agar dapat meminimalisirkan pengeluaran (beban) pajak. Manfaat perencanaan pajak dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan perencanaan pajak juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan (Kamila & Rachmawati, 2025; Putri & Rachmawati, 2023; Saraswati & Rachmawati, 2023; Faradita & Rachmawati, 2022; Merrysa & Rachmawati, 2018; Ariyanti & Rachmawati, 2025).

Dampak pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, diantaranya: Dapat meningkatkan laba bersih, meningkatkan nilai perusahaan,

mengurangi biaya keuangan, dan dapat meningkatkan kepercayaan Investor. Dengan ini bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui manajemen laba yang lebih baik (Suandy, 2011; Pohan, 2013; Rohman, 2020).

Keterkaitan perencanaan pajak dan manajemen laba didasarkan pada teori keagenan, yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah (Ayem & Arifah, 2019). Bagi perusahaan, perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak sehingga laba yang diperoleh tidak berkurang. Sebaliknya, pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pengeluaran negara. Sejalan dengan temuan Mulia dan Setiawati (2023), perencanaan pajak terbukti berdampak positif terhadap manajemen laba. Peningkatan laba yang dihasilkan mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan laba melalui strategi perencanaan pajak, semakin besar kecenderungan perusahaan dalam menerapkan manajemen laba.

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan positif antara perencanaan pajak dan manajemen laba

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan yang diangkat melalui RUPS dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, manajemen, maupun pihak berkepentingan lainnya. Kehadirannya memegang peran penting dalam struktur tata kelola perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Komisaris independen bertugas sebagai pengawas yang objektif untuk memastikan keputusan manajemen sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Sejalan dengan temuan Amaliyah dan Rachmawati (2019), peningkatan proporsi komisaris independen dalam perusahaan berimplikasi pada semakin kuatnya mekanisme pengawasan yang diterapkan. Independensi dan netralitas yang dimiliki memungkinkan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan transparan, sehingga dapat menjaga kualitas penerapan tata kelola perusahaan serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Berbeda dengan komisaris yang memiliki keterkaitan tertentu dengan perusahaan, komisaris independen relatif lebih terbebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga perannya menjadi krusial dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen tinggi cenderung lebih diawasi secara ketat, sehingga hubungan positif antara perencanaan pajak dan manajemen laba menjadi lebih lemah. Artinya, walaupun perusahaan melakukan perencanaan pajak, tindakan yang dilakukan tidak serta merta dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi laba karena adanya pengawasan yang efektif. Sebaliknya, jika di perusahaan yang proporsi komisaris independennya rendah, perencanaan pajak lebih mungkin digunakan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba karena lemahnya pengawasan dari dewan komisaris.

H₂: Komisaris independen memperlemah hubungan positif antara perencanaan pajak dan manajemen laba

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan bank di BEI 2021-2024, diambil dari situs resmi BEI. Sampel dipilih dengan *purposive sampling*. Kriteria utama yang diterapkan adalah bank konvensional yang tercatat secara berturut-turut di BEI selama periode penelitian, mengingat bank-bank tersebut diwajibkan mengikuti standar laporan keuangan yang ketat, sehingga data yang diperoleh lebih transparan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, sampel dibatasi pada bank yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2021-2024 agar proses analisis dapat dilakukan secara konsisten tanpa kendala data yang tidak tersedia. Bank yang mengalami laba negatif selama periode penelitian dikecualikan dari sampel karena kondisi keuangan yang tidak stabil berpotensi mempengaruhi praktik perencanaan pajak dan manajemen laba secara berbeda dibandingkan dengan bank yang memiliki kinerja keuangan yang sehat. Selain itu, data yang teridentifikasi sebagai outlier juga tidak disertakan dalam sampel untuk menghindari distorsi hasil analisis, sehingga temuan penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi umum secara lebih akurat dan objektif.

Penelitian ini memakai analisis regresi logistik, yakni metode statistik untuk menguji hubungan variabel dependen berbentuk *dummy* dengan variabel independen. Metode ini memperkirakan peluang peristiwa tertentu berdasarkan nilai variabel independen. Pengujian dilakukan dengan dua model dasar, yakni tanpa variabel moderasi dan model dengan variabel tersebut moderasi. Berikut disajikan model tanpa moderasi dan model moderasi dalam analisis regresi logistik:

• **Model Tanpa Moderasi:**

$$Pr(\Delta E_{it} = 1) = \frac{e_0^a + \alpha_1 CETR_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_3 SALES\ GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}}{1 + e_0^a + \alpha_1 CETR_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_3 SALES\ GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}}$$

• **Model Moderasi:**

$$Pr(\Delta E_{it} = 1) = \frac{e_0^a + \alpha_1 CETR_{it} + \alpha_2 KI_{it} + \alpha_3 CETR_{it} \times KI + \alpha_4 SIZE_{it} + \alpha_5 SALES\ GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}}{1 + e_0^a + \alpha_1 CETR_{it} + \alpha_2 KI_{it} + \alpha_3 CETR_{it} \times KI + \alpha_4 SIZE_{it} + \alpha_5 SALES\ GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan:

ΔE_{it}	= Distribusi laba perusahaan i tahun t
KI_{it}	= Komisaris Independen perusahaan i tahun t
$CETR_{it}$	= Perencanaan Pajak perusahaan i tahun t dengan proksi Cash Effective Tax Rate
$CETR_{it} \times KI$	= Interaksi untuk melihat apakah pengaruh perencanaan pajak terhadap Manajemen laba dipengaruhi oleh komisaris independen
$SIZE_{it}$	= Ukuran perusahaan, perusahaan i tahun t
$SALES\ GROWTH_{it}$	= Pertumbuhan Penjualan perusahaan i tahun t

Penggunaan variabel independen dan variabel kontrol pada penelitian ini dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Rumus
Manajemen Laba	Diberi nilai 1, jika berada di kriteria <i>small profit</i> ($0 < \Delta E_{it} < 0,01$) dan <i>small loss</i> ($-0,01 < \Delta E_{it} < 0$), dan diberi nilai 0 jika lainnya. (Phillips, et al., 2003)
Perencanaan Pajak	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ (Khasanah dan Devia, 2022)
Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$ (Setiawati, et al., 2024)
Ukuran Perusahaan (SIZE)	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$ (Kasmir, 2015; Rachmawati et al, 2019; Rachmawati et al, 2020; Rachmawati et al, 2023)
Sales Growth	$\text{Sales Growth Ratio} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}}$ (Kasmir, 2015; Rachmawati et al, 2019; Rachmawati et al, 2020; Rachmawati et al, 2023)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
CETR _{it}	94	0,212	0,080	-0,005	0,480
KI _{it}	94	0,558	0,106	0,333	0,800
SIZE _{it}	94	32,632	1,495	28,434	35,425
SALES GROWTH _{it}	94	0,084	0,176	-0,356	0,741
Variabel	<i>dummy</i> = 0		<i>dummy</i> = 1		
	N	Percent.	N	Percent.	
ΔE _{it}	63	67,02%	31	32,98%	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel independen manajemen laba (ΔE), yang diukur menggunakan variabel dummy, menunjukkan sebanyak 63 observasi atau sekitar 67,02% dari total sampel adalah perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba. Sementara itu, sebanyak 31 observasi atau sekitar 32,98% menunjukkan kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba, termasuk kategori small profit dan small loss. Untuk variabel perencanaan pajak yang diprosikan dengan CETR, rata-rata sebesar 0,212. Nilai minimum sebesar -0,005 menunjukkan perusahaan yang menerapkan strategi perencanaan pajak agresif, sementara nilai maksimum sebesar 0,480 mencerminkan perbedaan strategi antar perusahaan. Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif. Data menunjukkan rata-rata CETR sebesar 0,212, menandakan sebagian besar perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak.

Variabel komisaris independen (KI) memiliki rata-rata 0,558, menunjukkan proporsi di atas batas minimal 30-50%. Nilai maksimum 0,800 menandakan praktik tata kelola kuat, sementara minimum 0,333 menunjukkan batas bawah kepatuhan. Hasil statistik variabel kontrol SIZE menunjukkan pengukuran menggunakan logaritma natural dari total aset. Rata-rata SIZE 32,632 dengan standar deviasi 1,495, dan nilai minimum 28,434 serta maksimum 35,425. Sebaran nilai dekat rata-rata menunjukkan variasi ukuran perusahaan dalam sampel. Variabel kontrol Sales Growth dihitung dari selisih penjualan tahun berjalan dan sebelumnya, dibagi dengan penjualan sebelumnya. Rata-rata Sales Growth 0,084 menunjukkan tren

peningkatan penjualan. Nilai minimum $-0,356$ dan maksimum $0,741$ mengindikasikan perusahaan secara umum berhasil tingkatan pendapatan, menunjukkan kesehatan dan keberlanjutan bisnis.

4.2 Analisis Korelasi

Tabel 3
Hasil Pearson Correlation

	ΔE_{it}	$CETR_{it}$	KI_{it}	$SIZE_{it}$	$SALES\ GROWTH_{it}$
ΔE_{it}	1,000				
$CETR_{it}$	0,078	1,000			
KI_{it}	-0,032	-0,052	1,000		
$SIZE_{it}$	-0,111	0,082	-0,139	1,000	
$SALES\ GROWTH_{it}$	0,279	0,003	0,100	-0,108	1,000

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Hasil analisis korelasi mengindikasikan bahwa korelasi antara perencanaan pajak ($CETR$) dan manajemen laba sebesar $0,078$, yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan positif. Ini berarti bahwa perubahan $CETR$ hanya sedikit berhubungan dengan kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba. Nilai korelasi antara Komisaris independen (KI) dan manajemen laba (ΔE) adalah $-0,032$. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen memiliki hubungan yang secara lemah dengan penurunan manajemen laba. Semakin tinggi proporsinya, semakin kecil kecenderungan manipulasi laba. Sebaliknya, proporsi kecil komisaris independen sedikit meningkatkan kecenderungan tersebut.

Hasil korelasi antara ukuran perusahaan ($SIZE$) dan manajemen laba (ΔE) adalah $-0,111$, menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara keduanya. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan ($SIZE$), semakin kecil kecenderungan untuk melakukan manajemen laba (ΔE). Nilai korelasi antara variabel kontrol, yaitu pertumbuhan penjualan ($Sales\ Growth$), dan manajemen laba (ΔE), adalah $0,279$. Ini menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat, di mana perusahaan yang berhasil meningkatkan penjualannya cenderung memanfaatkan peluang tersebut untuk mengelola laporan keuangannya.

4.3 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, seluruh variabel independen menunjukkan nilai VIF di bawah 5. Artinya, tidak ada indikasi masalah multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
SIZE	1,04	0,965
KI	1,03	0,971
SALES GROWTH	1,02	0,980
CETR	1,01	0,991
MEAN VIF	1,02	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai $Prob > \chi^2$ sebesar 0,9775, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Artinya, tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas.

4.5 Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Hasil uji *hosmer-lemeshow* menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 3,29 dengan p-value 0,9147. Artinya, model regresi logistik dinyatakan *fit*.

4.6 Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji pseudo r-square tanpa moderasi menunjukkan nilai sebesar 0,0728, yang berarti model regresi logistik tanpa moderasi mampu menjelaskan sekitar 7,28% variasi pada variabel manajemen laba. Sementara itu, Tabel 6 yang berisi hasil uji pseudo r-square dengan moderasi menunjukkan nilai sebesar 0,0792, yang mengindikasikan bahwa model tersebut dapat menjelaskan sekitar 7,29% variasi dalam manajemen laba.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Tabel 5
Model Tanpa Moderasi

Variable	Dependent Variable: ΔE_{it}					
	Odds ratio	Std. err.	Z	$\{p > z \}$	95% Conf. Interval	
$CETR_{it}$	10,692	31,168	0,810	0,416	0,035	3238,060
$SIZE_{it}$	0,883	0,139	-0,780	0,434	0,648	1,204
$SALES GROWTH_{it}$	33,997	50,993	2,350	0,019	1,797	642,960
Constant	11,914	61,697	0,480	0,632	0,000	304650,8
LR chi2					8,680	
Prob > chi2					0,0339	
Pseudo R2					7,28%	
N					94	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan pada Tabel 5, variabel perencanaan pajak (CETR) dalam model regresi tanpa moderasi memiliki nilai probabilitas sebesar $0,416 > 0,05$, maka H_0 diterima. Artinya, CETR tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, karena perencanaan pajak dalam industri perbankan sangat diatur dan diawasi dengan ketat oleh regulator seperti OJK dan DJP. Selain itu, tingkat perbedaan (*disparitas*) CETR antar bank relatif kecil, karena struktur pajak dan kebijakan fiskal bersifat seragam di bawah peraturan yang sama. Dengan demikian, CETR tidak berfungsi sebagai indikator yang kuat dalam menjelaskan praktik manajemen laba di sektor perbankan. Sejalan dengan penelitian Tarigan & Susanti (2021), hasil ini menunjukkan bahwa CETR tidak memengaruhi manajemen laba secara signifikan dalam konteks perusahaan keuangan yang memiliki pengawasan regulasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang *highly regulated*, seperti perbankan, ruang fleksibilitas dalam perencanaan pajak lebih terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap manajemen laba menjadi tidak nyata.

Sementara itu, variabel *SIZE* memiliki *p-value* sebesar 0,434. Artinya, variabel kontrol tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ketidaksignifikanan ini sejalan dengan teori *political cost* (Watts & Zimmerman, 1986), yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari manipulasi laba untuk mengurangi sorotan publik dan tekanan politik. Namun, tidak semua perusahaan besar memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan manajemen laba, sehingga hasilnya dapat bervariasi antar perusahaan.

Selanjutnya, hasil analisis regresi logistik model tanpa moderasi yang ditampilkan pada Tabel 5 untuk variabel kontrol pertumbuhan penjualan (Sales Growth) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,019 < 0,05$. Mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan (Sales Growth) ini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini didukung dengan temuan yang diungkapkan oleh Skinner & Sloan (2002), pada situasi ini perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung mendapat tekanan kuat untuk menjaga performa keuangan agar tetap positif, sehingga mendorong mereka melakukan manajemen laba demi memenuhi ekspektasi investor dan menjaga citra manajemen.

4.7.2 Pengaruh Komisaris Independen antara Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel CETR x KI memiliki *p-value* sebesar 0,591 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima, yang berarti

hubungan antara perencanaan pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba pada industri perbankan. Karena dapat dijelaskan oleh struktur tata kelola di perbankan yang lebih ditentukan oleh regulasi eksternal (OJK, BI, DJP) daripada pengawasan internal komisaris independen. Sejalan dengan hasil penelitian Lubis et al. (2022), hasil menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan untuk memoderasi hubungan variabel keuangan dan manajemen laba pada sektor jasa keuangan. Hal ini memperkuat anggapan bahwa dalam industri yang *heavily regulated*, pengawasan eksternal lebih menentukan daripada struktur dewan pengawasan internal.

Tabel 6
Model dengan Moderasi

Variable	Dependent Variable: ΔE_{it}					
	Odds ratio	Std. err.	Z	$\{p > z \}$	95% Conf. Interval	
CETR _{it}	0,019	0,234	-0,330	0,741	1,600	2,440
KI _{it}	0,017	0,093	-0,760	0,446	5,650	558,952
CETRKI	2,222	5,0909	0,540	0,591	7,010	7,040
SIZE _{it}	0,881	0,143	-0,780	0,436	0,640	1,211
SALES GROWTH _{it}	36,974	55,980	2,380	0,017	1,901	718,827
Constant	109,198	631,741	0,810	0,417	0,001	9175999
LR chi2					9,430	
Prob > chi2					0,093	
Pseudo R2					7,92%	
N					94	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 6, regresi logistik dengan model moderasi menunjukkan variabel kontrol SIZE memiliki p-value 0,434, lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Meskipun perusahaan besar biasanya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan memiliki sumber daya serta fleksibilitas pengelola keuangan, tidak semua perusahaan besar melakukan manipulasi labam, sedangkan perusahaan kecil mungkin lebih terbuka terhadap resiko manipulasi, tetapi pengaruhnya tidak selalu signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan Wati dan Budiasih (2021), yang menyatakan SIZE tidak secara konsisten mempengaruhi manajemen laba, karena motivasi manipulasi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan kinerja. Putri et

al. (2023) menambah bahwa ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin tingkat transparansi tinggi jika sistem pengawasan internal tidak berjalan efektif.

Hasil regresi logistik dengan model moderasi di Tabel 6 menunjukkan variabel kontrol pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) memiliki nilai probabilitas $0,017 < 0,05$; yang berarti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan dengan *Sales Growth* tinggi biasanya ingin mempertahankan citra positif dimata investor, pemilik, atau pasar. Oleh karena itu, Ketika laba aktual tidak sesuai harapan, manajemen mungkin terdorong untuk mengatur laporan keuangan agar tetap terlihat stabil dan menarik. Sejalan dengan penelitian Rahayu dan Purnamasari (2020), tingkat pertumbuhan yang pesat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba demi memenuhi harapan investor dan pasar. Berdasarkan temuan terbaru dari Azizah et al. (2025), *Sales Growth* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa: 1) Perencanaan pajak (CETR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan ruang fleksibilitas dalam perencanaan pajak disektor perbankan sangat terbatas, mengingat industri ini merupakan sektor yang sangat diatur dan diawasi dengan ketat oleh OJK dan DJP. Regulasi yang seragam dapat mengakibatkan perbedaan CETR antar bank tidak cukup besar untuk memengaruhi praktik manajemen laba secara nyata. Temuan ini konsisten dengan studi Tarigan & Susanti (2021). 2) Peran moderasi komisaris independen (KI) dalam memperlemah atau memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba tidak terbukti secara signifikan. Hal ini menyatakan bahwa peran pengawasan oleh dewan komisaris independen belum berjalan secara optimal dalam mencegah praktik manipulasi laporan keuangan yang berkaitan dengan strategi pajak. Dalam perbankan, pengawasan eksternal dari regulator justru lebih dominan, sehingga struktur dewan komisaris, termasuk komisaris independen, memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi kebijakan strategis seperti manajemen laba. Temuan ini sejalan dengan studi Sari & Nugroho (2021) serta Lubis & Fauzan (2020).

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini terbatas pada bank konvensional di BEI, sehingga hasilnya tidak merepresentasikan seluruh sektor usaha, dan hanya fokus pada variabel perencanaan pajak (CETR), komisaris independen (KI), serta dua variabel kendali (SIZE dan Sales Growth). Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran manajemen laba yang lebih spesifik, seperti Modified Jones Model atau pendekatan akrual lainnya, menambahkan variabel lain seperti kualitas audit dan kepemilikan institusional, serta memperluas objek penelitian pada sektor selain perbankan, seperti manufaktur atau jasa, guna memperoleh temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A'alia, P. S., & Rachmawati, N. A. (2022). Pengaruh Financial Constraint Terhadap Agresivitas Pajak Di Masa Pandemi Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 73-90.
- Amaliyah, R., & Rachmawati, N. A. (2019). Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1(01).
- Amelia, W., & Hernawati, E. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. *Neo-Bis*, 10(1), 62-77.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The Role of Corporate Governance in Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1-2), 50-66.
- Ariyanti, N., & Rachmawati, N. A. (2025). Optimalisasi Nilai Perusahaan melalui Tax Planning dan Efisiensi: Analisis Moderasi Peran Gender di Dewan Direksi. *Jurnal Akuntansi*, 41-54.
- Aulia, F., & Nuryatno, M. (2021). The effect of tax planning and good corporate governance on firm value with earnings management as moderating variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 189-200.
- Avilya, L. T., & Ghozali, I. (2022). Pengaruh *Intellectual Capital*, *Good Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11 (4), 2022
- Ayem, S., & Arifah, P. H. N. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Dewantara*, 1 (2), 171-180
- Azizah, R. F., Damanik, R., & Siregar, S. P. (2025). Pengaruh pertumbuhan penjualan dan leverage terhadap praktik manajemen laba. *Jurnal Manajemen Strategi dan Bisnis*, 9(1), 12-23.
- Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 5,31%, yang turut mendorong peningkatan permintaan kredit.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Februari 6). Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen. *bps.go.id*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1950>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). *Separation of ownership and control*. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291-304.
- Fionita, Y., & Fitra, H. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3 (4), 2021.

- Fitriani, R., Heryanti, H., & Mawardi, R. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 101-110.
- Fulian, H. D. (2023). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021). Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*. Symposium Nasional Akuntansi X
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm. Managerial behavior, agency costs and ownership structure, 3(4), 305-360.
- Kamila, F. Z., & Rachmawati, N. A. (2025). EFEKTIVITAS PERENCANAAN PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI BEBAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN KONSULTAN PSIKOLOGI X. *Jurnal Akuntansi*, 82-91.
- Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia (2020)
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33(3), 375-400.
- Lubis, N. R. H., Syahyunan, S., & Azhmy, M. F. (2022). Pengaruh keberagaman dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1(2), 107-125.
- Merrysa, L. W., & Rachmawati, N. A. (2018). Manajemen laba dan perencanaan pajak sebagai sumber large positive book-tax differences terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(2).
- Mulia, B. P., & Setiawati, E. (2023). The Effect of Tax Planning, Firm Size and Profitability on Earnings Management. *The International Journal of Business Management and Technology*, 5 (1), 238-245.
- Nanda, U. L., & Somantri, Y. F. (2020). Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 6 (1), 2020
- Nasution, M., & Setiawan, D. (2007). Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Makassar Juli 2007*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19*.
- Prihari, A., & Khabibah, N. A. (2022). STUDI LITERATUR: PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 20 (2), 127.

<https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/34692/12438>

- Pullah, N. Z. A., Wibowo A.S, R. E., Nurcahyono, N., Sukesti, F., & Hanum, A. N. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 503-515.
- Purbolakseto, H. V., Tjahjadi, B., & Tjaraka, H. (2022). Peran Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Risiko Pajak Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Basic Material terdaftar di BEI 2017-2021). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 21(2), 169-186.
- Putri, M. D. Y., Rahmawati, & Cahyani, N. L. P. S. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 8(1), 22–33.
- Putri, S. B., & Rachmawati, N. A. (2023). Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. 3 (2): 365-378
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145-166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do country characteristics affect the complementary level of financial and tax aggressiveness?. *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), 161-176.
- Rahayu, S., & Purnamasari, D. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 101–110.
- Rahmawati, H. I. (2013). Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan. *Accounting analysis Journal* (2) 1. Universitas Negeri Semarang.
- Ramadhan, R., & Bandiyono, A. (2024). The Effect of Related Party Transactions, Tax Planning, And Leverage Moderated By Independent Commissioners On Earnings Management. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(8), 7117-7137.
- Rioni, S. Y., & Junawan. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11 (2), 2021
- Sadewa, D., & Sopian, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap Manajemen Laba. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(4), 2024.

- Sahara, K., & Oktafiani, D. (2022). Pengaruh Manajemen Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan (pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 7(1) 2022,12-26.
- Salmita, D. (2024). Manajemen Laba di Industri Perbankan : Suatu Pengujian Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8 (2), 2024.
- Saraswati, R., & Rachmawati, N. A. (2023). Kepemilikan Institusional dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 351-364.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).
- Skinner, D. J., & Sloan, R. G. (2002). Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don't let an earnings torpedo sink your portfolio. *Review of accounting studies*, 7(2), 289-312.
- Ujiyantho, M. A., & Bambang, A. P. (2007). Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan *Go Public* Sektor Manufaktur). *Symposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007*.
- Wahyuni, D. D. (2010). Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wati, L. N., & Budiasih, I. G. A. N. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 53-62.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory.
- Widyaningsih, H. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Nominal*, 6 (2), 2017.
- Wulandari, D., & Rachmawati, N. A. (2021). PERAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DALAM PENGAWASAN PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 2(1), 17-28.
- Yulianti, Y. (2004). Penggunaan Distribusi Laba Dalam Mendeteksi Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 89-104.